

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi adalah salah satu aspek penting untuk suatu daerah, yang berfungsi sebagai fasilitas penunjang kegiatan barang maupun manusia. Pergerakan barang dan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya agar dapat berlangsungnya suatu sumber daya yang tidak tersedia di suatu daerah tersebut. Hal ini merupakan akibat tidak meratanya sumber daya alam (SDA) antar daerah ke daerah lainnya.

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain (Salim 2000). Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditif) dan penumpang ke tempat lain. Pada setiap kota ataupun kabupaten sangat dibutuhkan adanya suatu sistem transportasi yang lancar, cepat, nyaman, teratur, dan baik untuk pergerakan setiap perpindahan manusia maupun barang.

Salah satu pendukung transportasi adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang baik adalah hal yang mendasar bagi transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam pergerakan barang dan jasa. Salah satu sarana yang transportasi yang sangat terlihat di masyarakat yaitu angkutan umum. Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar dengan maksud dan tujuan agar angkutan umum tersebut memberikan pelayanan yang baik dan layak bagi masyarakat.

Pada dasarnya angkutan umum penumpang sangat memerlukan prasarana yaitu terminal karena salah satu fungsi terminal untuk mengatur naik turun penumpang pada angkutan umum tersebut sehingga bisa dikatakan terminal sangat penting bagi prasarana transportasi. Kabupaten Kulon Progo termasuk daerah yang cukup berkembang di bidang

pariwisata. Di dalam Terminal Tipe B Wates termasuk didalam rencana tata ruang wilayah Kulon Progo yang pembangunannya yaitu dengan mengembangkan terminal yang awalnya Tipe B menjadi Tipe A dikarenakan Terminal Tipe B Wates dijadikan tempat menaikan dan menurunkan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dengan memperbaiki dan menambah fasilitas utama maupun fasilitas penunjang di terminal.

Banyak obyek wisata yang sangat di minati masyarakat dalam kota maupun luar kota , maka di butuhkanlah terminal angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) terminal yang dibutuhkan yaitu terminal tipe A. Kabupaten Kulon Progo sendiri sudah memiliki terminal tipe B, akan tetapi terminal tersebut tidak berfungsi secara optimal, dikarenakan banyaknya fasilitas fasilitas yang tidak layak bahkan tidak tersedia semestinya peraturan yang terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, dan ketersediaan fasilitas utama hanya tersedia 65% dan fasilitas penunjang hanya tersedia 40%.

Dalam melakukan aktivitas angkutan umum pada terminal, angkutan pedesaan yang melewati terminal tidak masuk kedalam terminal tersebut akan tetapi hanya berhenti di sekitar terminal atau dipasar.

Pada terminal tidak ada pembagian sirkulasi angkutan umum dan angkutan pribadi, dan dari 21 armada angkutan pedesaan pada trayek A1 dan 5 armada angkutan pedesaan pada trayek D5 yang melewati Terminal, tidak ada yang menaik turunkan penumpang kedalam terminal tersebut, hanya AKDP dan AKAP yang menaik turunkan penumpang di dalam terminal. Pada bagian angkutan umum pedesaan tidak melakukan pelayanan masuk, dalam terminal melainkan hanya berhenti di sekitar terminal. Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis bermaksud membuat kajian tentang "Peningkatan Pelayanan Akibat Perubahan Terminal Tipe B menjadi Tipe A Wates di Kabupaten Kulon Progo".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan yang terjadi dilapangan, maka indentifikasi masalah yang ditemukan antara lain :

1. Terminal tipe B Wates melayani angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), sementara pada PM 24 Tahun 2021 Terminal Tipe B hanya melayani hingga angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).
2. Angkutan Pedesaan pada trayek A1 dan trayek D5 tidak menaik turunkan penumpang di dalam terminal melainkan menaik turunkan penumpang di sekitar terminal dan pasar Wates.
3. Ketersediaan Fasilitas Terminal Tipe B Wates yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015, yaitu fasilitas utama sebanyak 65% dan Fasilitas penunjang sebesar 40%.
4. Pada ruas jalan di Terminal Wates terdapat jalan toyan bts wates dengan hambatan samping berupa banyak kendaraan yang berhenti di pertokoan dan pusat oleh oleh.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja Terminal Wates saat ini?
2. Bagaimana bentuk peningkatan tipe Terminal Wates dari Tipe B menjadi Tipe A?
3. Bagaimana layout rencana Terminal Tipe A Wates yang sesuai kebutuhan sarana, prasarana, dan penumpang?
4. Bagaimana kinerja jaringan jalan yang terdampak pada daerah kawasan Terminal sebelum dan sesudah dilakukan penataan?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penelitian

Penelitian dilakukan untuk meningkatkan tipe Terminal Wates dari tipe B menjadi tipe A agar optimal dalam melayani angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan Angkutan Pedesaan (Angdes).

Tujuan penelitian

1. Mengidentifikasi kondisi saat ini Terminal Wates.

2. Mengetahui bentuk peningkatan tipe Terminal Wates dari tipe B menjadi tipe A.
3. Membuat desain dan layout rencana terminal.
4. Mengetahui perbandingan kinerja jaringan jalan yang terdampak pada daerah kawasan Terminal Wates.

1.5 Ruang Lingkup

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat ruang lingkup yang bertujuan agar didalam analisis dan pembahasan dapat dilakukan secara detail dan tidak menyimpang dari tema yang dibahas. Adapun ruang lingkup yang diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032, yaitu berada di Terminal Penumpang di Kecamatan Wates.
2. Dalam penelitian ini tidak mengkaji mengenai proses pembangunan, kelayakan ekonomi dan finansial.